

# BAHASA SEBAGAI ALAT HEGEMONI: STUDI LITERATUR TENTANG WACANA MEDIA

Suhardi<sup>1</sup>, Salamah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>hardy.adi83@gmail.com

<sup>1</sup>Universitas Tulang Bawang

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung

---

## Abstrak

Artikel ini merupakan studi literatur yang mengkaji hubungan antara konsep hegemoni media dan ilmu bahasa, khususnya melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Dalam era digital, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial dan ideologi yang mendominasi. Pendekatan CDA memungkinkan pemetaan bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam membingkai wacana publik. Artikel ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual bagi kolaborasi interdisipliner antara kajian media dan linguistik kritis. Temuan dari literatur terdahulu menunjukkan bahwa integrasi antara CDA dan teori hegemoni dapat memperkuat analisis terhadap praktik representasi, dominasi simbolik, dan konsensus ideologis dalam teks media.

**Kata Kunci:** hegemoni media, analisis wacana kritis, linguistik, ideologi, kekuasaan

---

## I. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, media massa telah menjadi kekuatan dominan dalam membentuk opini publik, membingkai realitas sosial, dan mengarahkan kesadaran kolektif masyarakat. Peran media tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi arena pertarungan ideologis yang sarat dengan kepentingan. Dalam konteks inilah, konsep hegemoni media menjadi penting untuk dipahami sebagai bentuk otoritas yang beroperasi lewat tanda dan representasi yang bekerja secara halus dan tersamar namun efektif, melalui bahasa dan representasi.

Konsep hegemoni sebagaimana dikemukakan oleh Antonio Gramsci mengacu pada dominasi kelompok penguasa yang tidak dilakukan secara koersif, melainkan melalui penciptaan konsensus dan legitimasi di tingkat budaya dan ideologi. Media massa, dalam hal ini, berfungsi sebagai aparatus ideologis yang menyebarkan nilai-nilai dominan sehingga dianggap wajar oleh masyarakat luas. Namun, bagaimana proses ini berlangsung secara konkret? Di sinilah ilmu bahasa, khususnya melalui pendekatan analisis wacana kritis, memainkan peran penting dalam membongkar mekanisme linguistik

yang digunakan media dalam mengonstruksi dan mereproduksi kekuasaan.

Ilmu bahasa tidak hanya mempelajari struktur dan fungsi bahasa secara abstrak, tetapi juga menelusuri bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan. Dengan menggabungkan perspektif linguistik dan teori hegemoni, kita dapat memahami bahwa teks media bukanlah produk netral, melainkan sarat dengan ideologi yang tersembunyi di balik pilihan kata, struktur kalimat, dan narasi yang dibangun.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang menghubungkan antara teori hegemoni media dan pendekatan linguistik kritis, guna menunjukkan bahwa bahasa berperan sebagai alat hegemonik dalam proses komunikasi massa. Pendekatan ini diharapkan akan memberikan landasan teoritis yang relevan bagi pengembangan studi-studi interdisipliner di masa depan, terutama yang berkaitan dengan analisis representasi, framing, dan konstruksi ideologi dalam teks media.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka naratif, yang umum digunakan untuk mensintesis temuan-teoretis dan konseptual dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansinya dengan irisan antara hegemoni media dan analisis linguistik, khususnya melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis. Sumber-sumber diidentifikasi dari jurnal ilmiah, buku, dan basis data daring yang bereputasi. Tujuan dari metode ini bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk membangun pemahaman konseptual dan mengidentifikasi pola-pola tematik dalam wacana yang dikaji.

## III. TINJAUAN TEORETIS

### Konsep Hegemoni Media

Konsep hegemoni pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Italia, Antonio Gramsci, sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana kelas dominan mempertahankan kekuasaannya tidak hanya melalui alat negara (seperti militer atau hukum), tetapi juga melalui dominasi kultural dan ideologis yang diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dalam perspektif Gramsci (1971), hegemoni adalah kekuasaan yang diperoleh melalui penciptaan konsensus, bukan paksaan, yang diwujudkan dalam praktik-praktik budaya sehari-hari — termasuk media.

Media massa berperan sebagai alat utama dalam membentuk hegemoni ini, dengan menyebarkan pandangan dunia tertentu yang tampak “netral”, padahal sebenarnya mendukung kepentingan kelompok dominan. Menurut Stuart Hall (1980), media berperan dalam membingkai makna melalui proses encoding-decoding, di mana pesan media tidak hanya dikirim, tetapi juga ditafsirkan secara sosial oleh khalayak. Namun, karena produksi media

umumnya berada dalam kontrol elit ekonomi atau politik, maka dominasi ideologis sering kali tertanam dalam teks media itu sendiri.

Hegemoni media merujuk pada kondisi ketika narasi dan representasi yang disampaikan oleh media telah berhasil membentuk “cara berpikir umum” masyarakat — dengan kata lain, ketika nilai-nilai dominan dianggap sebagai kebenaran universal. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan menjadi tidak kasat mata, tetapi justru lebih efektif, karena masyarakat turut mereproduksi sistem nilai yang menguntungkan pihak tertentu.

Konsep ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam kajian kritis terhadap media kontemporer, seperti dalam pemikiran Herman dan Chomsky (1988) dalam teori propaganda model, yang menunjukkan bagaimana media bekerja sebagai penyaring informasi berdasarkan kepentingan pasar dan kekuasaan. Model ini senada dengan kerangka hegemoni Gramscian, bahwa media tidak bebas, tetapi tunduk pada relasi produksi kapitalis yang menentukan isi dan orientasi pemberitaan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hegemoni bukan berarti tidak ada perlawanan, tetapi perlawanan tersebut sering kali terpinggirkan, dibingkai negatif, atau diserap ke dalam narasi dominan melalui mekanisme kooptasi. Oleh karena itu, analisis terhadap bahasa yang digunakan media menjadi krusial untuk membongkar bagaimana proses hegemonik itu bekerja.

Dengan menjadikan media sebagai medan kontestasi ideologis, maka wacana-wacana yang dibentuknya tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan yang lebih luas. Bahasa menjadi alat utama dalam menciptakan dan menormalisasi kekuasaan tersebut. Pemahaman ini menjadi jembatan menuju diskusi berikutnya tentang bahasa sebagai instrumen kekuasaan dalam media.

## **Bahasa sebagai Alat Kekuasaan**

Bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi netral, melainkan merupakan medium utama dalam pembentukan dan reproduksi kekuasaan sosial. Dalam pandangan Norman Fairclough (1995), bahasa memiliki peran penting dalam menciptakan struktur sosial dan mempertahankan relasi kuasa melalui praktik-praktik wacana yang tampak “alami” atau “biasa”. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), Fairclough menegaskan bahwa setiap teks (termasuk berita media) mengandung konstruksi ideologis yang mencerminkan kepentingan tertentu.

Konsep kekuasaan dalam bahasa tidak hanya tampak dalam isi pernyataan, tetapi juga dalam cara suatu informasi disampaikan: pemilihan kata, struktur kalimat, metafora, hingga unsur yang ditekankan atau dihilangkan. Misalnya, penggunaan istilah “penertiban” alih-alih “penggusuran” dalam pemberitaan kebijakan pemerintah adalah bentuk pelunakan makna yang berfungsi melindungi otoritas penguasa dan meringkai tindakan tersebut sebagai sesuatu yang sah.

Teun A. van Dijk (1998) memperluas gagasan ini melalui kerangka cognitive discourse analysis, yang menekankan bahwa ideologi bekerja di tingkat representasi mental. Artinya, bahasa dalam teks media bukan hanya membentuk opini, tetapi juga memengaruhi struktur pengetahuan, sikap, dan kepercayaan pembacanya. Van Dijk menyoroti bagaimana kelompok dominan (misalnya elite politik atau media arus utama) mengontrol akses ke wacana publik, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membentuk kesadaran sosial melalui bahasa.

Dalam konteks media, relasi kekuasaan terwujud dalam akses terhadap sumber berita, posisi naratif, dan framing terhadap isu-isu sosial. Wacana media

seringkali menempatkan kelompok marginal dalam posisi inferior melalui representasi stereotip, generalisasi, atau penghilangan perspektif alternatif. Semua ini dilakukan melalui mekanisme linguistik yang halus — seperti aktor pasif dalam kalimat pasif (“massa dibubarkan” tanpa menyebut pelaku) atau penggunaan label ideologis yang merendahkan (“radikal”, “provokator”, dll).

Ilmu bahasa, terutama cabang pragmatik dan sosiolinguistik kritis, telah menunjukkan bahwa kekuasaan direalisasikan bukan hanya dalam apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak dikatakan, serta dalam konteks siapa yang berhak berbicara dan siapa yang dibungkam. Dengan demikian, bahasa bukan hanya cerminan realitas, tetapi juga alat untuk mengatur realitas sosial.

Dalam kerangka hegemoni media, analisis linguistik menjadi penting untuk membongkar bagaimana makna diproduksi, bagaimana wacana dominan dibentuk, dan bagaimana ideologi disebarluaskan tanpa tampak memaksa. Bahasa menjadi wahana utama bagi kekuasaan untuk menyusup ke dalam pemikiran masyarakat secara halus — dan justru karena itu, sangat efektif.

## **Bahasa sebagai Modal Simbolik dalam Dinamika Kuasa Media**

Pierre Bourdieu (1991) memandang bahasa tidak sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai bentuk modal simbolik yang memainkan peran penting dalam perebutan kekuasaan di dalam medan sosial (field). Dalam konteks media, bahasa digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang ada melalui cara-cara yang tampak “alami” atau “biasa saja,” padahal sebenarnya sarat ideologi.

Menurut Bourdieu, setiap agen sosial (termasuk jurnalis dan institusi media) beroperasi dalam suatu medan (field), yaitu ruang sosial tempat berbagai posisi dan

kekuasaan dipertarungkan. Dalam medan ini, habitus—yakni sistem disposisi yang tertanam secara historis dalam diri agen sosial—mengarahkan tindakan dan pilihan naratif para aktor media. Dengan kata lain, keputusan jurnalis dalam memilih angle berita, diksi, hingga cara penyusunan narasi sangat dipengaruhi oleh habitus profesional mereka yang dibentuk oleh lingkungan institusional, pendidikan, dan afiliasi politik mereka.

Media, dalam pandangan Bourdieu, bukanlah saluran netral, tetapi arena tempat modal simbolik dipertaruhkan. Pemilik media, misalnya, memiliki kekuatan untuk mengarahkan agenda pemberitaan melalui dominasi struktural terhadap narasi yang diproduksi. Dalam hal ini, modal ekonomi (kepemilikan media) bertransformasi menjadi modal simbolik melalui kontrol terhadap representasi realitas sosial.

Penerapan teori Bourdieu dalam analisis wacana media membuka peluang untuk menelaah bagaimana struktur kekuasaan internal media membentuk isi pemberitaan. Misalnya, bagaimana sebuah media yang dimiliki oleh oligarki politik tertentu lebih cenderung menampilkan narasi hegemonik yang menguntungkan kekuasaan, atau bagaimana jurnalis dengan latar belakang sosial tertentu lebih memilih bingkai berita yang selaras dengan nilai-nilai dominan.

Melalui pendekatan ini, kita bisa memahami bahwa dominasi dalam media tidak hanya berlangsung dalam teks, tetapi juga dalam struktur sosial produksi berita itu sendiri, dan bahwa setiap praktik diskursif selalu berakar pada relasi kuasa yang lebih luas dalam masyarakat.

### **Analisis Wacana Kritis dalam Media**

Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis / CDA) merupakan pendekatan interdisipliner dalam ilmu bahasa yang menekankan bahwa bahasa

tidak pernah netral. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk, mempertahankan, dan menantang struktur sosial tertentu. CDA berkembang sebagai respons terhadap pendekatan linguistik struktural yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan ideologis dalam penggunaan bahasa.

Dalam perspektif CDA, wacana dipahami sebagai praktik sosial yang kompleks — bukan hanya sebagai representasi verbal, melainkan sebagai bagian dari proses produksi makna yang berakar pada kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial. Oleh karena itu, CDA tidak hanya tertarik pada apa yang dikatakan, tetapi juga pada bagaimana, oleh siapa, dan dalam konteks apa sesuatu dikatakan. Hal ini membuka ruang bagi analisis yang lebih dalam terhadap relasi kuasa yang tersembunyi di balik struktur bahasa yang tampak "alami".

Dalam konteks media, CDA menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami bagaimana institusi media memainkan peran penting dalam memproduksi dan menyebarkan wacana-wacana yang berpengaruh secara sosial dan politis. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam membentuk opini publik, membingkai peristiwa, dan mendefinisikan makna sosial atas realitas. Pemberitaan media, misalnya, sering kali memuat pilihan kata, struktur naratif, atau representasi visual tertentu yang tidak lepas dari nilai dan kepentingan ideologis.

Tokoh seperti Norman Fairclough mengembangkan kerangka CDA tiga dimensi untuk menganalisis wacana media: (1) analisis teks (struktur linguistik), (2) analisis praktik diskursif (proses produksi dan konsumsi teks), dan (3) analisis praktik sosial (konteks sosial yang lebih luas). Dengan pendekatan ini, media dapat dipahami sebagai ruang di mana ideologi dan kekuasaan dinegosiasikan dan dipertahankan melalui bahasa.

Sementara itu, Teun A. van Dijk menekankan pentingnya struktur kognitif dalam memahami bagaimana teks media membentuk pemahaman masyarakat. Van Dijk menunjukkan bahwa kelompok dominan — seperti elite politik atau pemilik media — memiliki kontrol atas akses terhadap produksi wacana. Melalui strategi linguistik yang sistematis, seperti generalisasi, eufemisme, atau penghilangan aktor, mereka dapat mempengaruhi representasi peristiwa dan mengarahkan cara masyarakat menafsirkan realitas.

Misalnya, dalam pemberitaan tentang konflik sosial atau aksi protes, media arus utama sering kali membingkai kelompok demonstran sebagai pengganggu ketertiban, sementara aparat keamanan digambarkan sebagai penjaga stabilitas. Strategi ini tidak hanya hadir dalam isi berita, tetapi juga dalam struktur sintaksis, seperti penggunaan kalimat pasif untuk menyamarkan pelaku (“massa dibubarkan”) atau pilihan kata yang mengandung penilaian moral (“anarkis”, “radikal”).

Dengan demikian, CDA membantu kita untuk mengkritisi narasi-narasi media yang tampaknya objektif, tetapi sebenarnya sarat muatan ideologis. Analisis ini membuka ruang untuk melihat bahwa bahasa dalam media bukan hanya cermin realitas, tetapi juga alat untuk mengonstruksi realitas — sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Melalui pemahaman ini, CDA menjembatani disiplin ilmu bahasa dengan kajian kekuasaan dan media, serta menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengkaji praktik hegemoni kultural sebagaimana dipahami dalam tradisi Gramscian. Dengan kata lain, CDA memungkinkan kita melihat bagaimana kekuasaan tidak selalu bekerja melalui kekerasan atau paksaan, tetapi justru melalui bahasa yang dibingkai sedemikian rupa sehingga diterima sebagai sesuatu yang “normal” atau “alamiah”.

## **Studi Terdahulu yang Relevan**

Salah satu pendekatan penting dalam ranah analisis wacana media berasal dari karya Norman Fairclough (1995), yang menunjukkan bahwa teks-teks media membentuk konsensus sosial yang selaras dengan kepentingan elit melalui penggunaan diksi seperti “reformasi”, “efisiensi”, dan “modernisasi”. Kata-kata ini secara implisit membingkai kebijakan neoliberal seperti privatisasi sebagai sesuatu yang niscaya dan rasional, sekaligus menyingkirkan alternatif ideologis lain.

Teun A. van Dijk (1998) dalam analisisnya terhadap representasi imigran dan etnis minoritas di media Eropa mengidentifikasi strategi wacana seperti generalisasi, implikasi, dan leksikalisasi. Misalnya, imigran seringkali disandingkan dengan istilah seperti “gelap”, “ilegal”, atau “liar” yang memperkuat stereotip negatif. Strategi ini berperan dalam memperkuat narasi dominan mengenai superioritas budaya mayoritas serta pembenaran terhadap kebijakan imigrasi yang ketat.

Dalam konteks Indonesia, Eriyanto (2005) memanfaatkan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengkaji framing pemberitaan pemilu dalam media cetak. Ia menemukan bahwa media seperti Kompas dan Republika menggunakan diksi berbeda dalam menggambarkan aktor politik. “Kerusuhan” dan “ancaman” digunakan untuk kelompok oposisi, sementara istilah seperti “dukungan rakyat” dan “konsolidasi” digunakan untuk kekuatan politik mapan. Ini menunjukkan peran bahasa dalam membentuk makna politik yang selaras dengan posisi ideologis media.

Lebih jauh lagi, Haryatmoko (2016) mengkaji bagaimana dominasi simbolik dijalankan melalui iklan dan pemberitaan ekonomi. Dalam kasus iklan produk perbankan dan layanan finansial, ungkapan seperti “pilihan cerdas” atau “solusi masa kini” menciptakan ilusi kebebasan dan rasionalitas konsumen, padahal realitasnya

memperkuat ketimpangan struktural antara lembaga finansial dan masyarakat kelas bawah.

Dalam ranah digital, Zulli, Liu, dan Gehl (2020) menunjukkan bahwa algoritma media sosial memiliki fungsi ideologis. Mereka menemukan bahwa konten yang mendukung ideologi dominan seperti nasionalisme atau konsumerisme mendapatkan distribusi yang lebih luas karena sistem algoritma lebih mengutamakan keterlibatan (engagement) daripada pluralitas perspektif. Dengan demikian, kekuasaan simbolik tidak hanya hadir dalam teks, tetapi juga dalam infrastruktur teknologi digital yang mengatur distribusi wacana.

Perbedaan framing antara media arus utama dan media alternatif dalam peliputan aksi mahasiswa juga menegaskan bahwa bahasa adalah medan perebutan makna. Media arus utama cenderung menggunakan kata “kericuhan” atau “gangguan ketertiban umum”, sedangkan media alternatif memilih istilah “aksi demokratis” atau “perlawanan sipil”, memperlihatkan adanya konflik ideologis dalam konstruksi realitas sosial.

Studi terbaru turut memperluas pendekatan ini. Christopher Hart menggabungkan analisis wacana kritis dengan linguistik kognitif untuk menjelaskan bagaimana metafora dan struktur naratif media membentuk cara pandang terhadap isu-isu politik, seperti imigrasi. Metafora seperti “banjir imigran” atau “serbuan pengungsi” menjadi contoh framing kognitif yang mengukuhkan kepanikan sosial dan memperkuat sikap eksklusif. Pendekatan linguistik kognitif dapat membantu mengidentifikasi skema konseptual dan metafora yang memperkuat posisi ideologis dalam teks media (Hart, 2019)

Barbara McQuade (2024) dalam *Attack from Within* menyoroti bagaimana disinformasi digital disebarluaskan melalui media sosial dan berita palsu sebagai bagian

dari strategi sistematis untuk mengarahkan opini publik. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan ideologis kini tidak hanya dimanifestasikan melalui narasi wacana, tetapi juga melalui manipulasi data dan algoritma yang membentuk “realitas pasca-kebenaran”.

Kontribusi lokal juga terlihat dalam studi Qura, Rahmayanti, dan Amalia (2024) yang menganalisis dinamika leksikal media online Indonesia dalam memberitakan kasus perundungan menggunakan model Roger Fowler. Hasilnya mengungkap bahwa pilihan diksi seperti “bercanda” atau “konflik ringan” cenderung mengaburkan posisi korban dan menormalkan kekerasan simbolik.

Selain itu, dalam *Critical Discourse Studies and/in Communication* (Martínez Guillem & Toula, 2022), berbagai pendekatan interdisipliner ditawarkan untuk melihat hubungan antara komunikasi, media, dan kekuasaan dalam konstruksi realitas sosial. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran metodologis dalam memahami bagaimana praktik media tidak pernah netral, melainkan selalu berada dalam konteks ideologis tertentu.

Suhardi (2024) dalam artikelnya, mengkaji bagaimana media digital, termasuk media sosial dan platform alternatif digunakan oleh kelompok-kelompok minoritas dan gerakan sosial untuk menantang dominasi ideologis yang ada. Dengan pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini menyoroti bagaimana gerakan digital dapat memengaruhi opini publik dan menghadapi tantangan hegemoni yang ada.

Sengul (2025) dalam *Elgar Encyclopedia of Political Communication* juga menegaskan bahwa CDA merupakan alat penting untuk mengungkap struktur kekuasaan dalam praktik politik dan media. Dalam konteks pemilu, misalnya, analisis framing media terhadap kandidat tertentu

dapat mencerminkan afiliasi ideologis dan struktur kepentingan pemilik media.

Secara keseluruhan, pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA) memungkinkan kita membongkar struktur ideologis tersembunyi dalam teks media, sekaligus menunjukkan bagaimana bahasa menjadi instrumen kekuasaan yang membentuk kesadaran publik sesuai kepentingan dominan, baik melalui narasi, visual, maupun algoritma digital.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **Bahasa sebagai Instrumen Hegemoni dalam Media**

Media tidak semata-mata menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi arena produksi wacana yang sarat dengan muatan ideologis. Dalam kerangka Gramscian, hegemoni bekerja bukan melalui dominasi koersif, tetapi melalui persetujuan sukarela yang diperoleh dari masyarakat melalui kontrol atas makna dan nilai. Di sinilah bahasa memainkan peran penting sebagai instrumen untuk menciptakan dan mempertahankan konsensus sosial.

Analisis wacana kritis (CDA) menggarisbawahi bahwa bahasa media memiliki struktur-struktur tersembunyi yang sering kali menguntungkan kelompok dominan. Pilihan kata, metafora, narasi, dan struktur sintaksis menjadi sarana untuk menanamkan pandangan dunia tertentu tanpa disadari oleh khalayak. Hal ini menjadikan studi bahasa—khususnya linguistik kritis—sebagai perangkat penting dalam memahami dinamika kekuasaan dalam komunikasi massa.

##### **Peran Analisis Wacana Kritis dalam Membongkar Ideologi Media**

Dengan menggunakan CDA, peneliti dapat mengungkap cara-cara subtil di mana media membingkai realitas sosial. CDA berupaya untuk tidak hanya menjelaskan apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa dikatakan demikian, siapa yang diuntungkan, dan dalam konteks kekuasaan seperti apa wacana itu diproduksi.

Dalam konteks ini, karya Fairclough dan van Dijk menjadi referensi penting. Mereka menunjukkan bahwa media kerap mereproduksi struktur kekuasaan melalui narasi yang tampak netral. CDA memungkinkan pembacaan kritis terhadap teks media, mengungkap relasi antara bahasa dan kekuasaan yang tidak kasat mata.

Contohnya, dalam pemberitaan politik, kelompok oposisi bisa saja digambarkan sebagai "pengganggu stabilitas", sementara pemerintah sebagai "penjamin keteraturan". Kata-kata seperti ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan ideologis. Pemahaman ini membuka ruang bagi akademisi bahasa untuk masuk lebih jauh ke dalam ranah kajian media dan politik.

##### **Integrasi Keilmuan: Ilmu Bahasa dan Kajian Media Kritis**

Ilmu bahasa, melalui pendekatan CDA, telah berkembang melampaui batas deskriptif dan formalistik. Ia kini menyentuh aspek-aspek sosial dan politis, menjadikannya alat penting dalam kajian interdisipliner. Di sisi lain, kajian media kritis membutuhkan perangkat analisis yang kuat untuk mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja dalam teks dan narasi —

dan kebutuhan ini dijawab oleh teori dan metode dalam linguistik kritis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadi titik temu epistemologis antara ilmu bahasa dan studi hegemoni media. Bahasa menjadi titik masuk untuk membongkar dominasi simbolik dalam wacana publik. Ini membuka peluang kolaborasi riset dan pengembangan teori antarbidang yang saling memperkaya.

### **Peluang Riset dan Pengembangan Keilmuan**

Berdasarkan sintesis teori dan studi terdahulu, terbuka beberapa peluang pengembangan riset dan keilmuan di masa depan:

- Studi hegemoni digital: bagaimana algoritma dan bahasa visual dalam media sosial membentuk dominasi ideologi tertentu.
- Penerapan CDA dalam literasi media: mendorong masyarakat agar kritis terhadap bahasa dan framing media.
- Pengembangan CDA berbasis lokalitas: mengeksplorasi bagaimana wacana hegemonik dibentuk dalam konteks kultural Indonesia, misalnya dalam media daerah, pesantren digital, atau kampanye politik lokal.
- Kolaborasi lintas disiplin: antara ahli bahasa, sosiolog media, dan ilmuwan komunikasi dalam membaca dinamika kekuasaan kontemporer melalui teks.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Studi literatur ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara ilmu bahasa—khususnya melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*)—dengan kajian hegemoni media. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai sarana produksi dan reproduksi kekuasaan. Dalam konteks media massa, bahasa menjadi instrumen ideologis yang menyamarkan kepentingan kelompok dominan melalui narasi yang dianggap “netral” oleh masyarakat.

Pendekatan CDA memberikan perangkat analisis untuk membongkar struktur wacana yang menyimpan relasi kekuasaan. Melalui pembacaan kritis atas teks media, peneliti dapat mengungkap cara-cara halus di mana hegemoni dibentuk, dipertahankan, atau bahkan ditantang. Dengan demikian, integrasi antara linguistik dan kajian hegemoni tidak hanya memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap teks media, tetapi juga membuka ruang intervensi sosial dalam ranah literasi kritis.

### **Implikasi dan Rekomendasi**

Berdasarkan temuan kajian ini, beberapa implikasi dan rekomendasi keilmuan dapat dirumuskan:

- Penguatan kajian interdisipliner: Penggabungan antara ilmu bahasa dan ilmu komunikasi/media perlu terus dikembangkan untuk membangun pendekatan analisis sosial yang lebih komprehensif.
- Literasi media berbasis linguistik: Pendidikan literasi media di sekolah maupun masyarakat dapat diperkuat dengan pendekatan CDA agar khalayak tidak hanya memahami isi media, tetapi

juga ideologi di balik bahasa yang digunakan.

- Perluasan riset hegemoni digital: Di era algoritma dan media sosial, riset mengenai wacana hegemonik harus memperluas fokusnya pada bahasa visual, algoritmik, dan multimodal, yang kini membentuk opini publik secara masif.
- Kontribusi ke khasanah lokal: Peneliti Indonesia perlu mengembangkan CDA dengan memperhatikan konteks kebudayaan, politik, dan bahasa lokal, agar pendekatan ini lebih kontekstual dan relevan.

#### Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Cambridge: Polity Press.
- Eriyanto. (2005). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Jakarta: LKIS.
- Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. London: Edward Arnold.
- Fairclough, N. (2001). *Language and power (2nd ed.)*. London: Longman.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.)*. New York: International Publishers.
- Hart, C. (Ed.). (2019). *Cognitive linguistic approaches to text and discourse: From poetics to politics*. Edinburgh University Press.
- Haryatmoko. (2003). *Menyingkap kepalsuan budaya penguasa*. Basis, 52(11–12), November–Desember.
- Haryatmoko. (2016). *Critical discourse analysis (Analisis wacana kritis): Landasan teori, metodologi, dan penerapannya*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Martínez Guillem, S., & Toula, D. (Eds.). (2022). *Critical discourse studies and/in communication: Theories, methodologies, and pedagogies at the intersections*. Routledge.
- McQuade, B. (2024). *Attack from within: How disinformation is sabotaging America*. HarperCollins.
- Qura, U., Rahmayanti, I., & Amalia, N. (2024). *Dinamika leksikal di media massa online pada kasus-kasus perundangan di Indonesia: Analisis wacana kritis model Roger Fowler*. Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 6(2), 230–247.
- Sengul, K. (2025). *Critical discourse analysis*. In A. Nai, M. Grömping, & D. Wirz (Eds.), *Elgar encyclopedia of political communication*. Edward Elgar Publishing.
- Suhardi, S. (2024). *Bentuk-bentuk counter-hegemony media era internet*. Journal Media Public Relations, 4(2), 23–30. <https://doi.org/10.37090/jmp.v4i2.1893>
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. SAGE.
- van Dijk, T. A. (2006). *Discourse and manipulation*. *Discourse & Society*, 17(3), 359–383. <https://doi.org/10.1177/0957926506060250>
- Zulli, D., Liu, M., & Gehl, R. W. (2020). *Rethinking the “social” in “social media”*: Insights into topology, abstraction, and scale on the Mastodon social network. *New Media & Society*, 22(7), 1181–1199. <https://doi.org/10.1177/1461444820912533>